

**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI PAPUA**

**FLYPAPER EFFECT ANALYSIS ON LOCAL GOVERNMENTS  
IN PAPUA PROVINCE**

**Robert M. Wst. Marbun<sup>1</sup>**

robert@ieuncen.ac.id

**Ida Ayu Purbariani<sup>2</sup>**

purbariani@yahoo.com

**Charley M. Bisai<sup>3</sup>**

chabisay@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze the effect of General Allocation Fund Transfer (DAU) and Local Income (PAD) to local government expenditure (BD) in Papua Province. To determine and analyze how flypaper effect happen to the local government expenditure in Papua Province. This research using panel data in the 26 (twenty six) out of 29 local government in Papua Province in the year of 2010-2013 period. The data gathered from the Regency Expenditure Realization Report on the Fund report of local government that already get into final audit from BPK RI and submitted to the DJPK Ministry of Finance of The Republic of Indonesia and Papua in Figures that published by Central Bureau Of Statistics. This research results show that PAD and DAU at the same time positively affect the local government expenditure (BD) in Papua Province; but only DAU coefficient affects significantly and having a positive relation to the regency expenditure, while PAD statistically not significant to the local government expenditure in Papua Province. Coefficient value of DAU is higher than the PAD even though only the DAU is significant, this thing shows flypaper effect has detected happen on the local government expenditure in Papua Province.*

*Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund, DAU, PAD.*

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi fondasi lahirnya otonomi daerah yang di dalamnya terkandung hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur (mengorganisir), serta mengurus sendiri (mengelola) kegiatan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah dekonsentrasi dan desentralisasi tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi the founding father negara ini tampaknya menginginkan kedua azas tersebut digunakan sebagai jembatan untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintahan pusat dan daerah (Sarundajang, 2011).

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi daerah, pemerintah pusat tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawab secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pemerintah daerah tidak langsung bisa untuk mandiri. Dengan demikian diperlukan bantuan dana pemerintah pusat bagi pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana pemerimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

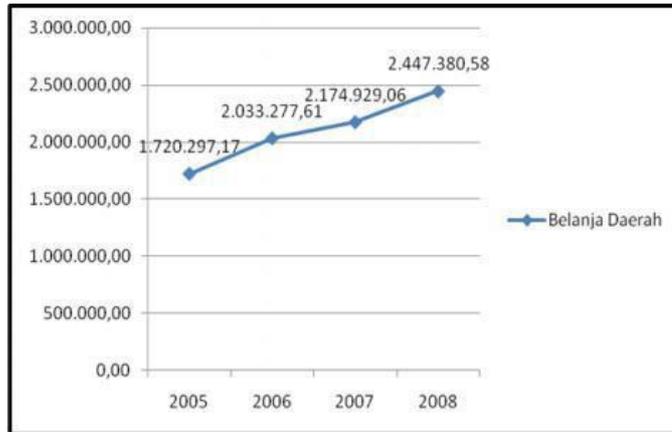
<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain itu, sebagai daerah yang telah otonom, daerah memiliki sumber dana lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapat lain-lain yang sah.

**Gambar 1.**

**Rata-Rata Total Belanja Daerah Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (Juta Rupiah)**

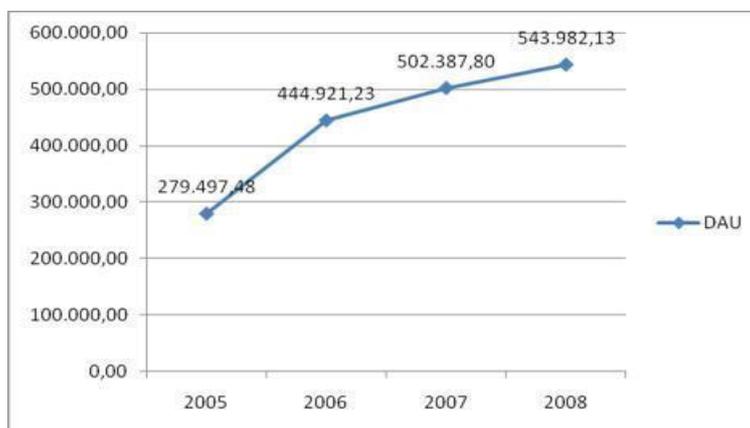


Sumber: Data diolah, 2015

Untuk membangun kemandirian suatu daerah maka perlu adanya pengeluaran-pengeluaran yang kita sebut sebagai Belanja Daerah (BD). Belanja daerah secara umum diatur dalam APBD terdapat dua yakni, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kecenderungan saat ini dalam prakteknya, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan DAU untuk belanja operasional ketimbang belanja modal.

**Gambar 2.**

**Rata-Rata Total DAU Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (Juta Rupiah)**



Sumber: Data diolah, 2015

Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal (fiscal gap) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan,

hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi beberapa pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut flypaper effect (Hines, 1995).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada terjadinya flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Implikasi flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut: 1). Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 2). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas. 3). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 4). Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Pemendagri No. 59 tahun 2007).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah secara jelas diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB V tentang Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Mendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah, direvisi menjadi PP Mendagri No. 59 tahun 2007 bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: A) Pendapatan Asli Daerah, berupa 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. B) Dana Perimbangan, C) Pinjaman Daerah, D) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Belanja Daerah (BD)**

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan PP Kepmendagri No. 13/2006 dan revisinya Kepmendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

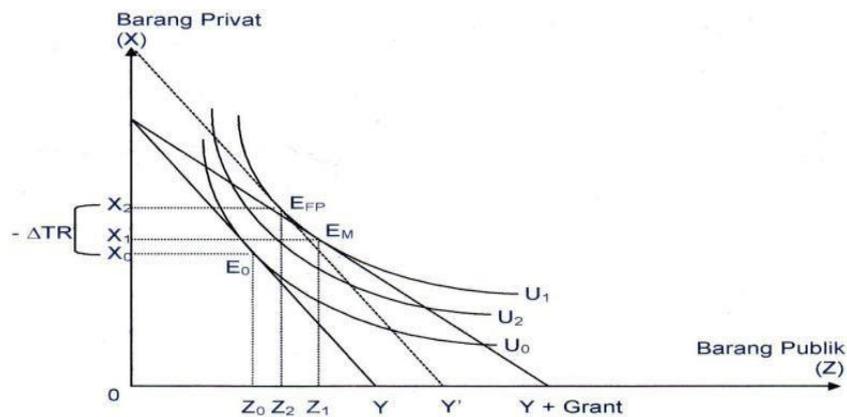
### **Teori Transfer**

Berdasarkan pendapat Rosen (1999:497-500) dan Boex (2001:7) bahwa bantuan (grants transfer) dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1). Bantuan bersyarat (conditional grants), bantuan ini sering disebut juga categorical grants atau specific grants yang terdiri atas bantuan penyeimbang (matching grants) dan bantuan bukan penyeimbang (non- matching grants). Bantuan penyeimbang terdiri atas bantuan penyeimbang tidak terbatas (open-ended matching grants) dan bantuan penyeimbang terbatas (closed ended matching grants); 2) Bantuan tidak bersyarat (unconditional grants) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu, artinya pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bantuan tanpa syarat ini biasanya ditentukan berdasarkan formula pemerataan (equalization formula) yang mengukur kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal; dan 3) Bantuan bagi hasil (revenue sharing).

### **Flypaper Effect**

Wilde (1968) dalam Kuncoro (2007) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi. Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Transfer ini bertujuan, mewujudkan terjadinya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya. Analisis Wilde dapat diringkas ke dalam Gambar 4 yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik. Seperti halnya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indiferens ( $U_0$ ,  $U_1$ ,  $U_2$ ) dengan kendala anggaran (garis Y dan Y+G (grants)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas dengan kendala pendapatannya. Transfer bersyarat (conditional grants)

berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (open-ended matching grants), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik.



Gambar 3.

**Pengaruh Transfer Bersyarat**

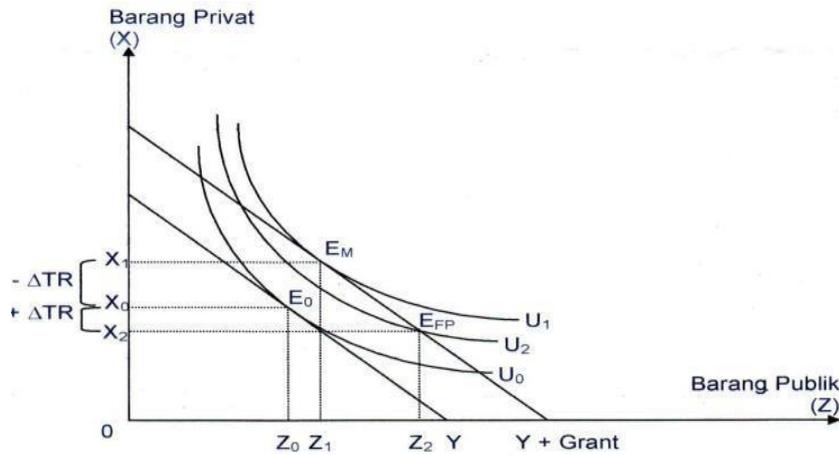
(Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. Akibatnya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari semula  $Z_0$  menjadi sebesar  $Z_1$ . Besarnya pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya (elastisitasnya). Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar  $X_1$ , setelah penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar  $X_2$ . Dengan demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Dalam kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), transfer sebesar  $G$  mendorong kenaikan garis anggaran dari  $Y$  ke  $Y+G$  pada Gambar 5. Mengikuti Bradford dan Oates (1971), Borcharding dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal.

Dengan asumsi tersebut maka transfer yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik  $E_0$  ke  $E_M$ . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar  $Z_1$  dan  $X_1$ .

**Gambar 4.**  
**Pengaruh Transfer Tak Bersyarat**



(Sumber : Haryo Kuncoro, *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.2007)

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, maka tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian mengakibatkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar  $-\Delta TR$ , sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik  $E_{fp}$  (bukannya pada  $E_m$ ) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah ( $+\Delta TR$ ) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari  $Z_1$  menjadi  $Z_2$ ). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Fenomena tersebut dalam banyak literatur disebut flypaper effect. Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengukur kepekaan (sensitive) permintaan terhadap perubahan-perubahan harga dan terhadap perubahan-perubahan pendapatan digunakan konsepsi elastisitas, yaitu suatu ukuran perbandingan dalam mana perubahan-perubahan baik dalam pembilang maupun penyebut dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau persentase (Hirshleifer, 1985).

**METODE PENELITIAN****1. Jenis, Sumber, dan Tehnik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan penerimaan untuk masing-masing variabel yang diteliti yang diperoleh baik dari publikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah provinsi Papua maupun kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua. Namun tidak menutup kemungkinan data dapat juga diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga negara yaitu BPK dan/atau BPKP, serta studi kepustakaan lain yang dianggap perlu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif yang menggambarkan fenomena flypaper effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dalam Tahun Anggaran 2010 – 2013 yakni melalui uji statistik regresi berganda. Hasil uji statistik tersebut akan memperkuat hasil dan menentukan apakah terjadi atau tidak fenomena flypaper effect. Selanjutnya untuk menyelesaikan rumusan masalah kedua digunakan jenis data kualitatif dengan cara memperoleh data melalui teknik studi literatur.

**2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua. Jumlah pemerintah daerah hingga tahun 2015 adalah sebanyak 29 pemerintah daerah yaitu 28 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota.

Dalam penelitian ini tidak semua pemerintahan kabupaten/kota diambil menjadi obyek penelitian sehingga perlu pengambilan sampel. Sedangkan tehnik yang digunakan adalah tehnik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) dimana kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Selama kurun waktu 2010 – 2013 kabupaten dan kota yang menjadi sampel adalah yang memiliki ketersediaan data yang diperlukan yakni data PAD, DAU, dan BD.
- b. Selain itu terdapat pemisahan yang disengaja antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/ kota yang diakibatkan oleh perbedaan bobot daerah antara kedua jenis administrasi pemerintahan tersebut.

Dengan melihat bahwa penelitian ini tidak menggunakan sensus dan untuk memenuhi kriteria di atas maka pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpilih selanjutnya akan disebut sebagai sampel penelitian.

Setelah dilakukan tabulasi maka didapati hampir semua kabupaten di provinsi Papua bisa dimasukkan sebagai sampel dalam penelitian ini, kecuali kabupaten Deiyai, Intan Jaya, dan kota Jayapura. Hal ini mungkin bukan karena data tersebut tidak ada namun disebabkan oleh penulis tidak dapat memperolehnya selama kurun waktu penelitian. Adapun kabupaten-kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	No	Kabupaten
1	Kabupaten Asmat	14	Kabupaten Mimika
2	Kabupaten Biak Numfor	15	Kabupaten Nabire
3	Kabupaten Boven Digoel	16	Kabupaten Nduga
4	Kabupaten Dogiyai	17	Kabupaten Paniai
5	Kabupaten Jayapura	18	Kabupaten Pegunungan Bintang
6	Kabupaten Jayawijaya	19	Kabupaten Puncak
7	Kabupaten Keerom	20	Kabupaten Puncak Jaya
8	Kabupaten Kepulauan Yapen	21	Kabupaten Sarmi
9	Kabupaten Lanny Jaya	22	Kabupaten Supiori
10	Kabupaten Mamberamo Raya	23	Kabupaten Tolikara
11	Kabupaten Mamberamo Tengah	24	Kabupaten Waropen
12	Kabupaten Mappi	25	Kabupaten Yahukimo
13	Kabupaten Merauke	26	Kabupaten Yalimo

Sumber: Data diolah, 2015

**Tehnik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (multiple regression) yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan secara empiris mengenai fenomena flypaper effect.

Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian. Persamaan umum yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dan kemudian dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Untuk menilai flypaper effect } Y_i = \alpha + \beta_1 \text{DAU}_{1i} + \beta_2 \text{PAD}_{2i} + e$$

$$\text{Menggunakan lag 1 tahun } Y_i = \alpha + \beta_1 \text{DAU}_{1t-1} + \beta_2 \text{PAD}_{2t-1} + e_{\text{SEP}}$$

Dimana :

- $Y_i$  : jumlah Belanja Daerah (BD)
- $\alpha$  : konstanta
- $\beta_1 \beta_2$  : koefisien regresi
- $\text{DAU}_{1i}$  : jumlah DAU tahun berjalan
- $\text{PAD}_{2i}$  : jumlah PAD tahun berjalan
- $\text{PAD}_{1t-1}$  : PAD tahun sebelumnya
- $\text{DAU}_{1t-1}$  : DAU tahun sebelumnya, dan
- $e$  : error term.

Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing- masing variabel. Syarat terjadinya flypaper effect adalah (1) apabila efek (nilai koefisien)

DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. Atau dapat dijelaskan sebagai berikut: jika koefisien DAU > Koefisien PAD maka terjadi flypaper Effect, atau dapat difungsikan jika  $b_1 > b_2$  berarti  $\frac{b_1}{b_2} > 1$  maka terjadi flypaper Effect (Tresch, 2002:924).

**HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Ekonometrika: Pemilihan Metode Analisis Data**

Setelah dilakukan perhitungan maka hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Common Effect, pendekatan Fixed Effect, dan pendekatan Random Effect masing-masing sebagai berikut:

**Metode Common Effect:**

Dependent Variable: BD?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/16/15 Time: 07:45  
 Sample: 2010 2013  
 Included observations: 4  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 104  
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD?	2.494270	1.255547	1.986600	0.0496
DAU?	1.419182	0.122258	11.60810	0.0000
R-squared	0.106821	Mean dependent var	7.10E+11	
Adjusted R-squared	0.098065	S.D. dependent var	5.32E+11	
S.E. of regression	5.05E+11	Akaike info criterion	56.7294	
Sum squared resid	2.60E+25	Schwarz criterion	56.80379	
Log likelihood	-2949.153	Hannan-Quinn criter.	56.77354	
Durbin-Watson stat	1.314234			

**Metode Fixed Effect:**

Dependent Variable: BD?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 12/16/15 Time: 07:46  
 Sample: 2010 2013  
 Included observations: 4  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 104  
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.66E+11	2.73E+11	0.606335	0.5461
PAD?	0.158202	2.521949	0.062730	0.9501
DAU?	1.207208	0.597703	2.019746	0.0469
Fixed Effects (Cross)				

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.339178	Mean dependent var	7.10E+11
Adjusted R-squared	0.104412	S.D. dependent var	5.32E+11
S.E. of regression	5.03E+11	Akaike info criterion	56.95164
Sum squared resid	1.93E+25	Schwarz criterion	57.66359
Log likelihood	-2933.485	Hannan-Quinn criter.	57.24007
F-statistic	1.444749	Durbin-Watson stat	1.765060
Prob(F-statistic)	0.108013		

**Metode Random Effect:**

Dependent Variable: BD?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/16/15 Time: 07:47  
 Sample: 2010 2013  
 Included observations: 4  
 Cross-sections included: 26  
 Total pool (balanced) observations: 104  
 Swamy and Arora estimator of component variances  
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.61E+11	1.66E+11	1.565962	0.1205
PAD?	2.753818	1.262052	2.182015	0.0314
DAU?	0.876967	0.367057	2.389183	0.0187
Random Effects (Cross)				

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		5.03E+11	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.128144	Mean dependent var	7.10E+11
Adjusted R-squared	0.110879	S.D. dependent var	5.32E+11
S.E. of regression	5.01E+11	Sum squared resid	2.54E+25
F-statistic	7.422384	Durbin-Watson stat	1.352432
Prob(F-statistic)	0.000983		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.128144	Mean dependent var	7.10E+11
Sum squared resid	2.54E+25	Durbin-Watson stat	1.352432

Setelah dilakukan uji Chow (uji F) untuk menentukan metode Common atau Fixed yang tepat dengan membandingkan *Sum squared resid* kedua metode tersebut diperoleh hasil bahwa metode Fixed yang lebih tepat. Selanjutnya dengan uji Hausman (uji Chi square) untuk menentukan apakah metode Fixed atau Random yang paling tepat dalam analisis penelitian ini didapati bahwa metode Fixed tetap yang paling tepat dipakai.

**Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.339178	Mean dependent var	7.10E+11
Adjusted R-squared	0.104412	S.D. dependent var	5.32E+11
S.E. of regression	5.03E+11	Akaike info criterion	56.95164
Sum squared resid	1.93E+25	Schwarz criterion	57.66359
Log likelihood	-2933.485	Hannan-Quinn criter.	57.24007
F-statistic	1.444749	Durbin-Watson stat	1.765060
Prob(F-statistic)	0.108013		

Hasil analisis data pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah keseluruhan pemda sampel di Provinsi Papua diperoleh nilai koefisien determinasi atau R<sup>2</sup> sebesar 0,3392 menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD memberikan kontribusi sebesar 33,93 persen dalam mempengaruhi Belanja Daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sedangkan sisanya sebesar 66,07 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam studi ini.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.66E+11	2.73E+11	0.606335	0.5461
PAD?	0.158202	2.521949	0.062730	0.9501
DAU?	1.207208	0.597703	2.019746	0.0469

Dari hasil ini dapat dituliskan persamaan/model regresi berganda menjadi

$$\text{BD} = \mathbf{1,66E11} + \mathbf{0,1582 PAD} + \mathbf{1,2072 DAU} + \mathbf{e}$$

(0,6063)            (0,0627)            (2,0197)

**Pengujian Secara Parsial (Uji t)**

Nilai t hitung variabel bebas DAU sebesar 2,0197 dengan probabilitas sebesar 0,046 berarti probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha 0,05 (0,046 < 0,05) sehingga dapat menyimpulkan secara statistik DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU dengan

Belanja Daerah (BD). Jika DAU bertambah maka Belanja Daerah juga bertambah, ceteris paribus. Sedangkan nilai t hitung variabel bebas PAD sebesar 0,0627 dengan probabilitas sebesar 0,9501 berarti probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada Alpha 0,05 ( $0,9501 > 0,05$ ) sehingga dapat menyimpulkan secara statistik PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Daerah. Jika DAU bertambah maka Belanja Daerah juga bertambah, ceteris paribus.

### **Analisis Flypaper Effect pada Provinsi Papua**

Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana respon (tanggapan) terhadap pengeluaran daerah (belanja daerah, BD) yang disebabkan oleh terjadinya perubahan jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar daripada yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (PAD). Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi, di mana pemda dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Penentuan terjadinya flypaper effect dapat dilakukan dengan membandingkan dua koefisien variabel bebas yaitu dana transfer (DAU) dengan PAD, dimana nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, atau PAD tidak signifikan (Maimunah, 2006).

$$\mathbf{BD} = \mathbf{1,66E11} + \mathbf{0,1582 PAD} + \mathbf{1,2072 DAU} + \mathbf{e}$$

$$(0,6063) \quad (0,0627) \quad (2,0197)$$

Nilai koefisien regresi DAU sebesar 1,2072 dengan t hitung 2,0197 dan probabilitas 0,046 (alpha 0,05) secara statistik DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD), sedangkan nilai koefisien PAD sebesar 0,1582 dengan t hitung 0,0627 dan probabilitas 0,9501 (alpha 0,05) secara statistik PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD). Hasil uji signifikansi kedua koefisien regresi tersebut diatas sudah menunjukkan terpenuhinya salah satu syarat terdeteksinya Flypaper Effect pada pemerintahan daerah di provinsi Papua. Hasil penelitian ini mendukung studi yang telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), Maimunah (2006), dan Iskandar (2012).

### **Implikasi Flypaper Effect**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mandiri dari segi keuangan, karena belum mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998:18) serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah yang ada di Papua. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:

- a. Menyebabkan celah kepincangan fiskal (Fiscal gap) akan tetap ada. Fiscal gap merupakan kerangka kebijakan Pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah, maka jika terjadi flypaper effect artinya pencapaian pemberian dana transfer kurang optimal. Ini terlihat pada analisis perkembangan DAU dan belanja daerah.
- b. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sumber daya alam lainnya.
- c. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada Pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti Pemerintah Pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.
- d. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol dan mengevaluasi penggunaan dana DAU, hal ini diperlukan untuk mencegah respon yang berlebihan dalam menyingkapi penerimaan DAU di daerah.
- e. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan (Walidi, 2009: 35).

Implikasi yang penting dari Flypaper Effect ini adalah Pemerintah daerah memperlihatkan perilaku yang tidak seperti biasanya, sehingga adanya cenderung melakukan manipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD, seharusnya pemerintah daerah mulai untuk mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Hasil pengujian dengan regresi berganda menunjukkan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (BD), yang artinya ada indikasi terjadi flypaper effect pada Provinsi Papua.
2. Flypaper effect membawa implikasi dimana salah satunya akan cenderung meningkatkan belanja pemerintah daerah di Provinsi Papua lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah yang ada di Papua.

## Saran

1. Pemerintah Provinsi, kabupaten, serta kota di Papua harus mulai mengusahakan intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber penerimaan dari dalam daerah sendiri guna mewujudkan kemandirian secara keuangan, dimana sumber-sumber yang selama ini sudah dikelola dapat ditingkatkan penerimaannya melalui penertiban pungutan serta personal pemungut yang bertanggung jawab, serta potensi-potensi yang sudah diteliti bisa mulai dijalankan.
2. Dalam penelitian berikut perlu diperhatikan sumber-sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat, serta turut memperhitungkan unsur demografi (jumlah penduduk) sebagai salah satu faktor penentuan besaran DAU.
3. Perlu diperhatikan akuntabilitas pengelolaan dan pemungutan dana-dana yang dipungut dari perekonomian guna menunjang peningkatan PAD dari setiap daerah pemerintahan.
4. Prosedur untuk memperoleh data yang lebih terbuka terutama data laporan keuangan tahun terkini, terutama yang sudah berupa realisasi, dan juga hasil pemeriksaan BPK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
- Choi, Luibson, & Madrian. Mental Accounting in Portofolio Choice: Evidence From a Flypaper Effect. *American Economic Review*. 2009.
- Dahlberg M, Mork, Rattso, & Agren. Local Taxes and Spending: Estimating the Flypaper Effect Using a Discontinuous Grants Rule. 2007.
- Deller S, Maher, Lledo. Winconsin Local Government, State Shared Revenues And The Illusive Flypaper Effect. Staff Paper No. 451. 2002.
- Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal : 47-63. Hirshleifer, Jack. 1985. Teori Harga dan Penerapannya. Terjemahan Kusnedi. Erlangga, Jakarta.
- Gorodnichenko, Yuriy. Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine. Thesis. The National University of Kyiv-Mohyla Academy. 2001.
- Grossman J. Phillip. The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: A Test of The Fiscal Illusion Hypothesis. Discussion Paper. 1988.
- Greene, H. William. 1997. *Econometric Analysis*, Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesobroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE. Haryo Kuncoro, 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal*
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Hines R. James, & Thaler H. Richard. Anomalies: The Flypaper Effect. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 4. J Stor. 1995.
- Inman P. Robert. The Flypaper Effect. NBER Working Paper. 2008.

- Irham Iskandar. 2012. "Flypaper Effect Pada Unconditional Grant". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2012, hal. 113- 131.
- Kuncoro, Haryo. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 10*. 2007. Makassar.
- Kusumadewi A. Diah, & Rahman. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. *JAAI Vol. 11, No. 1*, 67-80. 2007.
- Maimunah, Mutiara. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. 2006. Padang.
- Prakosa B. Kesit. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8, No. 2*. 2004.
- Rosen. 1999. "The "Flypaper" Effect is not An Anomaly". Yale University and University at California. Cowless Foundation Paper No.1113.
- Tresch, Richard. 2002. "Finance Public Anormative Theory". Department of Economic , Boston College Chestnut Hill, Massachusetts.
- Turnbull, G.K. 1998. "The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: theory and Empirical Evidence", *Journal of Urban Economics*, 44(1), Juli: 1-26.
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, Tesis (tidak dipublikasikan). Medan. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2009.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sarundajang, S.H. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Ed 3. Kata Hasta Pustaka. 2011. Jakarta.